

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) sudah sering kali terjadi diberbagai sektor. Kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan keinginan untuk melakukan segala sesuatu untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang salah seperti melakukan penipuan, manipulasi, kelicikan atau mengelabui yang dapat berupa salah saji atas laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi. Kecurangan akuntansi sudah mendapat banyak perhatian publik sebagai dinamika yang menjadi pusat perhatian para pelaku bisnis dunia. Bahkan di Indonesia, kecurangan akuntansi sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun.

Kecurangan atau *fraud* merupakan suatu perbuatan menyimpang yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk kepentingan diri pelaku atau untuk kepentingan kelompok. Menurut *Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam Novaria Tri Kurniasari, et.al (2018) *fraud* digolongkan dalam tiga jenis yaitu, (1) kecurangan dalam laporan keuangan adalah kecurangan dengan cara menyembunyikan informasi keuangan, mengatur laporan keuangan dan mengubah laporan keuangan dengan tujuan mengelabui pembaca laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, (2) penyalahgunaan aset adalah kecurangan dengan cara menggunakan atau

mengambil aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan (3) korupsi adalah kecurangaan dengan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.¹

Pada sektor publik, kecenderungan kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan di sektor swasta bentuk kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana. Demikian juga halnya dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak luput dari permasalahan praktik kecurangan akuntansi. Tindakan kecurangan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menggunakan kelihaiian tertentu, yang dipilih seorang individu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Soepardi dalam jurnal Laurensia Br Tarigan:

Terdapat opini bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta

¹ Novia Tri Kurniasari, et. al **Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process**, E-jurnal, Vol 10 No Khusus, April 2018

menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis.²

Tindakan kecurangan merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukan kecurangan. Kecurangan biasanya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada.

Penelitian Amelia (2018) menjelaskan bahwa variasi kecurangan di Indonesia, lebih dikenal dengan istilah KKN atau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara, sedangkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan

² Laurensia Br Tarigan, **Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**, Jurnal Ekonomi, Vol. 3 No. 1, 2016

perbuatan memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Lebih jelasnya, dalam penelitian Amelia (2018) mengungkapkan Indonesia memiliki tingkat korupsi yang tinggi, hal tersebut tidak hanya dipersepsikan oleh masyarakat dalam negeri tetapi juga masyarakat luar negeri. *Transprancy international* (TI) merupakan organisasi internasional di bidang akuntabilitas di mana menerbitkan *Corruption Perceptions Index* (CPI). TI menghitung CPI dengan cara memberi nilai atau skor dari 0 (*highly corrupt*) sampai dengan 100 (*very clean*). Skor CPI Indonesia tidak mengalami perubahan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 37. Sebagai perbandingan, skor tersebut masih jauh dibandingkan dengan skor CPI tahun 2017 yang diperoleh negara New Zeland dan Denmark yaitu sebesar 89 dan 88 yang mana menempati peringkat 1 dan 2. Untuk kawasan ASEAN, negara yang menduduki peringkat tertinggi yaitu Singapura dengan skor 84 menduduki peringkat 6. Negara Brunei Darussalam (skor 62 peringkat 31) atau Malaysia (skor 47, peringkat 62).

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi diantaranya adalah pengendalian internal. Pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Selain itu, pengendalian internal juga memberikan jaminan yang wajar terhadap informasi yang akurat. Oleh sebab itu, jika pengendalian internal

yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan efektif maka pengendalian internal dapat diandalkan untuk melindungi dari kecurangan termasuk apabila ada karyawan yang berniat melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selain pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi merupakan faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Menurut Thoyibatun (2012)

Ketaatan aturan akuntansi merupakan kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya.³

Ketaatan aturan akuntansi yang baik sangat mempengaruhi kelancaran kinerja suatu instansi ataupun organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Selain itu, perilaku tidak etis juga merupakan faktor penyebab kecenderungan kecurangan akuntansi. Dijk dalam Thoyibatun (2012) menjelaskan bahwa **perilaku tidak etis merupakan perilaku menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati⁴**. Perilaku tidak etis muncul ketika seseorang merasa ingin memiliki terhadap sesuatu yang ia inginkan. Hasil peneliti terdahulu Ridha dan Sekar (2016) menunjukkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya jika semakin tinggi perilaku tidak etis

³ Siti Thoyibatun, **Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi**, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 16, No. 2. Hal. 245 – 260, 2012

⁴ **Ibid.** hal. 248

dalam suatu instansi maka akan meningkatkan kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal inilah yang mendorong suatu instansi harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap suatu instansi.

Terjadinya kecurangan dalam akuntansi disebabkan adanya tiga kondisi yang biasa disebut dengan teori *fraud triangle* (segitiga kecurangan) yaitu: (1) Faktor tekanan, yaitu adanya insentif, tekanan dan kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi tersebut dalam lingkup entitas pemerintah yaitu keadilan distributif. Apabila karyawan merasa ketidakadilan didalam suatu organisasi maka akan mengakibatkan karyawan merasakan tidak dihargai dan merasakan lingkungan kerja yang kurang kondusif sehingga dapat menimbulkan kemarahan, kebencian, pemberontakan serta protes terhadap organisasi. Hal inilah yang memberikan tekanan sehingga dapat memicu terjadinya tindakan menyimpang seperti melakukan kecurangan untuk mendapatkan kepuasan pribadi. (2) Faktor kesempatan atau peluang, yaitu kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan. Penerapan pengendalian internal yang efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. (3) Sikap atau rasionalisasi, menyebabkan pelaku kecurangan membenarkan tindakannya. Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi tersebut dalam lingkup entitas pemerintah yaitu perilaku tidak etis.

Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perkembangan moral yang dikembangkan oleh Kohlberg (1969) yang dituangkan dalam penelitian terdahulu Devi, Agusdin dan Animah (2016) menjelaskan mengenai ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis yang mempunyai enam tahapan yang dibagi kedalam tiga tingkatan: pra-konvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Manajemen pada tahap konvensional mulai membentuk moralitas manajemennya dengan membuat dan memelihara aturan. Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Suatu instansi atau lembaga akan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi, diantaranya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laurensia Br Tarigan (2016) meneliti tentang pengaruh moralitas individu, asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, studi pada BUMD Provinsi Riau. Penelitian Laurensia dilatarbelakangi oleh adanya data Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Riau, total penerimaan dari BUMD Provinsi Riau pada periode 2010-2013 hanya Rp 583.000.000.000 yang tidak mencapai target. Padahal sebelumnya, beberapa masalah juga ditimbulkan oleh BUMD Riau, diantaranya PT SPR yang tak

mau diaudit oleh pihak BPKP selaku tim auditor yang dipilih langsung oleh Pemerintah Propinsi Riau. Tak hanya itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau dengan tegas menyatakan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengalami masalah.

Muammar dan Fauziah (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum dan perilaku tidak etis terhadap kecurangan akuntansi, studi pada SKPA provinsi Aceh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindakan kecurangan akuntansi yang sering terjadi seperti kasus korupsi. Hal ini dapat dibuktikan dengan kasus penyalahgunaan dan penggelapan anggaran negara di pemerintah daerah Aceh, yaitu kasus korupsi penyelewengan dana APBD pada tahun 2004 senilai Rp 4.130.000.000 yang dilakukan oleh mantan gubernur Aceh, Abdullah Puteh bersama Kepala Biro Hukum dan Humas Setwil Aceh, Hamid Zein. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi ialah keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum dan perilaku tidak etis.

Penelitian oleh Deni, Prayitno dan Erna (2015) dengan judul analisis pengaruh sistem pengendalian internal, asimetri informasi, perilaku tidak etis dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah yang diakibatkan oleh lemahnya pengendalian internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, adanya asimetri informasi yang terjadi antara

agen dan prinsipal serta perilaku tidak etis yang dimiliki oleh pegawai yang bertanggung jawab dalam menjalankan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Selain itu kesesuaian kompensasi juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian lain oleh Ali Amin dan Stevanus (2020) meneliti tentang pengaruh efektivitas pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara di Ambon. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat korupsi di Daerah Kota Ambon yaitu menduduki peringkat 4 dari 33 Provinsi di Indonesia. Penanganan kasus korupsi di Daerah Kota Ambon masih kurang menonjol dengan banyaknya kasus yang berlarut-larut. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti melakukan penelitian di Daerah Kota Ambon.

Berikutnya, penelitian oleh Fanny, Rita dan Nur Azlina (2021) dengan judul pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Desa (OPD) Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kecurangan akuntansi ditandai dengan adanya tindakan dan kebijakan yang disengaja, dimana tindakan tersebut bertujuan untuk berbuat curang.

Penelitian oleh Ridha dan Sekar (2016) meneliti tentang pengaruh ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis, komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada BUMN Kota Jakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengungkapkan sering menemukan kecurangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal perhitungan akuntansi. Perusahaan milik pemerintah diduga membuat laporan seolah-olah laba yang diterima lebih besar dari laba yang sebenarnya. Hal ini digunakan untuk kepentingan perusahaan. Akuntan publik yang dipercaya melakukan perhitungan akuntansi ini juga diduga ikut menutupi kecurangan tersebut. Hal serupa juga banyak ditemui pada perbankan BUMN dengan membuat laporan seolah-olah perusahaan mengalami kerugian besar. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya tindakan kecurangan yang terjadi pada BUMN Kota Jakarta.

Siti, Ika dan Aftania (2019) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen dan budaya tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Penelitian Siti dilatarbelakangi oleh ditemukannya tindak kecurangan yang terjadi pada tahun 2018 di beberapa pemerintah Kota Pekanbaru, antara lain korupsi berjamaah yang dilakukan oleh tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau atas tersangka korupsi dana anggaran perjalanan

dinas dengan kerugian negara sebanyak Rp 1.200.000.000. Kantor BPKAD merupakan tempat terjadinya seluruh transaksi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik kabupaten maupun kota dan tempat rawan terjadinya kecurangan akuntansi.

Selanjutnya penelitian Chindy Kurnia (2017) meneliti tentang pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi” pada SKPD Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan kecurangan akuntansi yang tidak lepas dari kasus korupsi yang terjadi. Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi di dunia yaitu peringkat 88 dari 168 negara (*transparency international*, 2015), sedangkan hasil *Failed State Index*, (2012), Indonesia berada di urutan 100 dari 182 negara. Hal ini membuktikan bahwa tindakan korupsi di Indonesia belum banyak berubah. Dalam penelitian ini mengemukakan adanya berupa fenomena yang terjadi pada tahun 2016 dimana mantan Bupati Bengkalis periode 2010- 2015 ditahan karena diduga ikut menikmati uang haram dana hibah dan bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 272.000.000.000 pada tahun anggaran 2012.

Penelitian dari Laurensia Br Tarigan (2016) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, asimetri informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, efektivitas pengendalian internal berpengaruh

signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Muammar dan Fauziah (2017) menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ali Amin dan Stevanus (2020) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Perilaku Tidak Etis Atas Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Literatur)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh atas kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh atas kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh atas kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal atas kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi atas kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk mengetahui pengaruh perilaku tidak etis atas kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai seberapa pentingnya pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis atas kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kecenderungan kecurangan akuntansi
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan menjadi referensi dalam pengembangan teori bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Fraud Triangle*

Dalam teori ini terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Ketiga faktor tersebut digambarkan dalam segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Dalam penelitian Kurniawati (2012) menyebutkan konsep segitiga kecurangan pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953). Melalui serangkaian wawancara dengan 113 orang melakukan penggelapan uang perusahaan yang disebutnya “*trust violators*” atau “pelanggar kepercayaan”, Cressey menyimpulkan bahwa orang yang dipercaya menjadi pelanggar kepercayaan ketika ia melihat dirinya sendiri sebagai orang yang mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain, sadar bahwa masalah ini secara diam-diam dapat diatasinya dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemegang kepercayaan di bidang keuangan, tindak-tanduk sehari-hari memungkinkan menyesuaikan pandangan mengenai dirinya sebagai seseorang yang bisa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan.

Cressey (1953) dalam jurnal Tuannakotta (2007) menyimpulkan bahwa kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat umum. *Fraud triangle* terdiri dari tiga kondisi:

1. Tekanan (*pressure*), manajemen atau pekerja memiliki insentif atau dibawah tekanan yang memberikan alasan untuk melakukan kecurangan. Tekanan yang memberikan motivasi untuk melakukan kecurangan antara lain:

Ketamakan atau keasyikan dengan kesuksesan

Gaya hidup melebihi kemampuan

Hutang pribadi yang tinggi

Kebutuhan finansial yang tak terduga

Kebiasaan yang mahal, seperti penggunaan obat, alcohol, perjudian

Tantangan untuk mengalahkan sistem tanpa ketahuan

2. Kesempatan (*opportunity*), yaitu adanya atau ketersediaannya kesempatan untuk melakukan kecurangan. Kesempatan ini umumnya timbul di dalam sistem pengendalian yang lemah. Jika sebuah instansi memiliki sistem pengendalian yang lemah maka kesempatan untuk melakukan kecurangan akan timbul. Namun, meskipun instansi sudah memiliki pengendalian yang bagus, hal itu tidak menutupi terjadinya kecurangan yang umumnya dilakukan oleh mereka yang merupakan orang kepercayaan atau mereka yang memiliki wewenang.

3. Rasionalisasi (*rasionalization*), yaitu pelaku memiliki alasan rasional (pembenaran) atas tindakan kecurangan tersebut. Rasionalisasi biasanya berkaitan dengan integritas, kode etik dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Rasionalisasi tindakan kecurangan umumnya disebabkan oleh:

Perasaan bahwa semua orang melakukan hal yang sama

Percaya dipekerjakan berlebihan

Keinginan untuk balas dendam

Kepercayaan bahwa tidak seorangpun yang rugi

Percaya bahwa kecurangan merupakan utang dan akan dibayar kembali

Asumsi bahwa kecurangan hanya untuk sementara

Harga diri atau moral yang rendah

2.1.2 Teori Perkembangan Moral

Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan pengembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan Kohlberg 1969 dalam jurnal Devi, Agusdin dan Animah (2016). Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral, yang merupakan dasar dari perilaku etis yang memiliki enam perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia. Kohlberg (1969) memperluas pandangan dasar ini dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama

kehidupan, ia menggunakan cerita-cerita tentang dilema moral dalam penelitiannya dan ia tertarik pada bagaimana orang-orang akan menjustifikasi tindakan-tindakan mereka bila mereka berada dalam persoalan moral yang sama, kemudian mengkategorisasi dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam enam tahap yang berbeda. Keenam tahap tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional

Enam tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg (1976):

a. Tingkat Pra Konvensional

Pada tingkat ini, individu bertindak sesuai aturan budaya, label baik dan buruk, serta pernyataan benar atau salah. Individu menafsirkan bahwa terdapat konsekuensi baik berupa hukuman, hadiah maupun pertukaran nikmat pada saat mereka melakukan atau tidak melakukan tindakan sesuai aturan atau label yang berlaku. Dua tahapan tersebut yaitu:

1. Orientasi hukuman dan ketaatan

Konsekuensi fisik yang dicerminkan dari kebaikan atau keburukan yang sudah individu lakukan.

2. Orientasi minat pribadi

Pemenuhan kebutuhan pribadi, melihat unsur keadilan dan timbal balik.

Melihat dari segi apakah untungnya buat saya

b. Tingkat Konvensional

Individu akan bertindak berdasarkan persetujuan keluarga dan teman-teman serta pada norma yang ada di masyarakat. Kurang adanya konsekuensi langsung yang jelas. Sikap individu bukan hanya bentuk konformitas harapan pribadi maupun tatanan sosial tetapi, juga merupakan kesetiaan untuk aktif mempertahankan, memberi dukungan, dan mengidentifikasi orang yang terlibat dalam suatu kelompok. Dua tahap berikut:

1. Orientasi keserasian interpersonal dan konformitas (Sikap anak baik)

Menurut kelompok, perilaku baik adalah perilaku yang menyenangkan dan suka membantu orang lain. Perilaku sering dinilai berdasarkan niatnya, apabila individu berniat baik maka, seseorang akan menilai individu tersebut menjadi baik.

2. Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial (Moralitas hukum dan aturan)

Ada orientasi yang mengarah kepada otoritas, memperbaiki aturan, dan memelihara tatanan sosial. Perilaku yang benar terdiri dari menyelesaikan pekerjaan individunya, menghormati otoritas, dan memelihara tatanan sosial yang sudah membantu menyelesaikan kepentingan individu.

- c. Tingkat Pasca Konvensional

Pada tingkatan ini terdapat upaya yang jelas untuk mendefinisikan nilai moral dan prinsip-prinsip yang memiliki validitas yang terpisah dari kelompok. Hal tersebut

diartikan sebagai ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang. Tingkatan ini juga memiliki dua tahap:

1. Orientasi kontrak sosial

Logistik orientasi, tindakan yang benar cenderung di defefinisikan dalam istilah hak dan standar individu secara umum yang telah diperiksa dan disetujui secara kritis oleh masyarakat.

2. Prinsip etika universal (*principled conscience*)

Hak ditentukan oleh keputusan hati nurani sesuai dengan etika yang dipilih sendiri berdasarkan prinsip yang menarik bagi kelengkapan logis, universalitas dan konsistensi. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis, mereka tidak konkret. Prinsip keadilan universal meliputi timbal balik dan kesetaraan hak manusia serta menghormati martabat manusia sebagai makhluk individu.

2.2 Kecurangan Akuntansi (*fraud*)

2.2.1 Pengertian kecurangan Akuntansi

Kecenderungan kecurangan akuntansi atau *fraud* merupakan suatu masalah yang sering menjadi perhatian di Indonesia maupun di dunia. Berbagai sebutan yang lazim yang digunakan atas tindakan kecurangan. Sebutan tersebut meliputi; kecurangan (*fraud*), kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), penggelapan (*embezzlement*) dan lain-lain.

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*:

“Kecurangan merupakan segala sesuatu yang secara luhai dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan atau mengelabui dan cara tidak jujur lainnya”.⁵

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Darmawan menjelaskan defenisi kecurangan (*fraud*) adalah setiap tindakan akuntansi sebagai:

1. Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan
2. Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan percurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.⁶

Kecurangan (*fraud*) berhubungan dengan didaptkannya keuntungan dari menipu atau membohongi seseorang dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan misalnya dalam unsur-unsur yang tidak terduga, tipu daya dan perilaku tidak jujur yang merugikan orang lain serta melakukan manipulasi seperti menghilangkan atau menghapus catatan dan dokumen untuk menghilangkan informasi yang bertujuan untuk merusak atau menciptakan sebuah informasi yang tidak benar.

⁵ Fanny Yulia, Rita Anugerah dan Nur Azlina, **Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**, Jurnal Ilmiah Feasible, Vol.3 No. 1, 2021.hal 88-96

⁶ Eko Darmawan, **Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi**, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 08, No.02, 2019, hal 9

2.2.2 Tipe- Tipe Kecurangan Akuntansi

Tindakan kecurangan dapat terjadi dimana saja. Organisasi tidak cukup hanya bersikap reaktif ketika menjumpai kecurangan. Organisasi perlu memiliki kepekaan dan sikap proaktif dalam menyikapi tindak kecurangan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kepedulian dan ketelitian terhadap fenomena yang sedang terjadi dalam organisasi.

Menurut Amin Widjaja dalam Wahyuni terdapat dua tipe kecurangan akuntansi yaitu:

1. **Kecurangan eksternal**
Kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah.
2. **Kecurangan Internal**
Tindakan tidak legal yang dilakukan oleh karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Kecurangan tersebut akan menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan itu sendiri.⁷

2.2.3 Faktor- Faktor Yang Menimbulkan Kecurangan

Dalam sebuah organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta tidak lepas dari tindakan kecurangan yang berdampak cukup fatal, seperti hancurnya reputasi organisasi, kerugian organisasi, kerugian keuangan negara, rusaknya moral karyawan serta dampak-dampak lainnya. Kecurangan dilakukan dengan tindakan yang

⁷Rista Wahyuni, **Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016 hal 31-32

disengaja oleh individu atau lebih untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Banyak hal yang menyebabkan kecurangan terjadi didalam organisasi seperti dalam Karyono (2013), AFCE mengelompokkan penyebab kecurangan kedalam dua bentuk yaitu:

- a) *Internal fraud* yaitu kecurangan yang terjadi secara alami karena lemahnya sistem pengendalian dalam setiap bentuk kegiatan dimana seseorang dimungkinkan untuk melakukan kecurangan
- b) *System control fraud* yaitu kecurangan terjadi karena lemahnya sistem pengendalian dan biasanya pelaku mempunyai pengetahuan tentang bagaimana suatu sistem pengendalian internal bekerja.

2.2.4 Dampak Negatif Kecurangan

Kecurangan atau *fraud* di suatu Negara akan berdampak pada berbagai sendi kehidupan bernegara dan semakin besar *fraud* maka akan semakin besar pula dampaknya. Menurut Richard Holoway dalam Karyono (2013), penasehat anti KKN di Indonesia, dampak *fraud* berupa korupsi Indonesia yaitu:

1. Dampak Finansial

- Aset finansial Negara pindah ketangan pribadi atau kelompok.
- Rendahnya pendapatan Negara terutama dari pajak.
- Kurangnya dana untuk pelayanan publik bagi warganya seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan lain.

- Dana yang dibutuhkan untuk menciptakan pendapatan dan investasi asing lambat masuk karena iklim keuangan tidak sehat.

2. Modal Sosial

- Kurang percaya masyarakat pada sistem peradilan dan lembaga-lembaga Negara kurang efektif.
- Penguasa mendahulukan pendapatan pribadi dari pada Negara.
- Kurang memahami kesepakatan tentang praktik tata pemerintahan yang baik.
- Ketidakpercayaan pada institusi publik.

3. Modal Fisik

- Banyaknya sumber daya yang hilang.
- Sumber daya yang ada mengalami erosi sehingga tidak berkelanjutan.
- merosotnya infrastruktur nasional karena di bangun di bawah standar.

4. Modal Manusia

- Kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya berkurang.
- Orang miskin semakin tidak dapat mengakses pelayanan pemerintah.
- Kesempatan warga untuk berperan serta dalam proses melahirkan aturan untuk mengatur kehidupan sangat minim.

2.2.5 Pencegahan Kecurangan

Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah daripada “mengobati”nya. Para ahli memperkirakan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi. Menurut Steve Alberht dalam Diaz (2013), Alberht mengelompokkan pencegahan *fraud* ke dalam dua kelompok sebagai berikut:

1. Pencegahan *Fraud* dengan budaya kerja (*Soft Control*)

Pencegahan *fraud* yang berhasil harus melibatkan *soft control* yaitu penciptaan lingkungan yang mampu menghalangi timbulnya bibit-bibit *fraud* dengan menciptakan budaya yang sehat, jujur, terbuka, dan saling tolong menolong. Di dalam budaya terdapat empat faktor penting yang harus diperhatikan dalam menciptakan budaya yang sehat, jujur, terbuka dan saling tolong menolong yaitu:

- a) Menyusun dan mengkomunikasikan kode (*code of conduct*) yang mudah dipahami dan dihormati, yang selanjutnya adalah memantau keefektifan implementasi kode etik dan menegakkan aturan bila ada yang melanggar.
- b) Memilih atau mempekerjakan orang-orang yang jujur melalui penyaringan latar belakang perilaku dan riwayat penyimpangan serta mendidik pegawai tentang kesadaran bahaya *fraud* dan program anti *fraud* di perusahaan.

- c) Menyediakan program yang membantu masalah finansial, psikologi atau sosial pegawai
 - d) Menciptakan lingkungan kerja yang positif.
2. Pencegahan *fraud* dengan pengendalian intern dan tata kelola pencegahan *fraud* dengan pengendalian intern dan tata kelola terdiri dari:
- a) Menerapkan pengendalian intern yang baik untuk mencegah dan mendeteksi *fraud*
 - b) Mencegah terjadinya kolusi
 - c) Mendorong pihak ketiga agar mematuhi kebijakan perusahaan termasuk yang terkait dengan hubungan bisnis yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - d) Memantau dan mengenal pegawai khususnya perilaku yang menyimpang sehingga dapat lebih dini membina pegawai tersebut.
 - e) Sistem pemantau atau pengaduan *fraud* (tips *hotline* atau *whistleblower system*)
 - f) Hukuman, ketakutan pelaku dan pelaku potensi akan hukum yang jelas dan tegas menghalangi terjadinya perbuatan tidak jujur dan *fraud*

2.3 Pengendalian Internal

2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.

Mulyadi (2002) mengemukakan :

“Pengendalian internal merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas”⁸

Menurut PP No.8 Tahun 2006 dalam Vani Adelin

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan”⁹.

Zulkarnain mengatakan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif merupakan suatu sistem yang terdiri dari kebijakan, prosedur, cara, dan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan agar rencana dan tujuan dapat dicapai dengan baik.

⁸ Mulyadi, **Auditing**, Buku 1. Edisi 1. Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal. 180

⁹ Vani Adelin, **Artikel Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Bumn Di Kota Padang)**, Universitas Negeri Padang, 2013, hal.4

Dengan adanya pengendalian internal yang efektif akan menghindarkan terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan perusahaan¹⁰

Wahyuni mengemukakan bahwa **“Pengendalian internal adalah keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan instansi yang berkaitan dengan menjaga keandalan penyajian laporan keuangan, efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku”**¹¹

Dari beberapa defenisi- defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi dalam proses operasional suatu instansi agar tujuan dari instansi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

2.3.2 Unsur- Unsur Pengendalian Internal

Dalam pengendalian internal, ada unsur-unsur pengendalian yang perlu diperhatikan agar sistem pengendalian internal bisa berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan pengendalian internal. Unsur-unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut:

¹⁰ Rifqi Mizra Zulkarnain, **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Pada dinas Kota Surakarta**, Accounting Analisis Journal 2013

¹¹ Rista Wahyuni, **Op.cit.**, hal. 11

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain: falsafah manajemen dan gaya operasional, struktur organisasi, komite audit, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab, kebijakan dan prosedur kepegawaian.

2. Prosedur Pengendalian

Merupakan kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen di dalam lingkungan pengendalian untuk memberikan cukup kepastian bahwa sasaran perusahaan dapat tercapai. Prosedur pengendalian umum yang dapat dipadukan di seluruh sistem akuntansi dan berlaku bagi semua perusahaan yang meliputi:

- a. Personil yang kompeten dan putaran tugas agar penetapan sistem akuntansi berhasil diperlukan personil yang mampu melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, semua personil akuntansi perlu mendapatkan latihan yang memadai dan harus diawasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan memutar personil ini dari tugas satu ke tugas lainnya secara periodik. Dengan perputaran tugas yang dilakukan diharapkan akan membantu menemukan penyimpangan yang terjadi.

- b. Pemberian tanggungjawab agar karyawan bekerja dengan efisien, harus ditetapkan tanggungjawab agar masing-masing secara jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kurang jelas
- c. Pemisah tanggungjawab untuk operasi yang berhubungan untuk mengurangi kemungkinan inefisiensi, kekeliruan, dan penggelapan, maka tanggungjawab atau operasi yang berhubungan hendaknya dibagi antara dua orang atau lebih.
- d. Pemisah antara operasi dan akuntansi. Tanggungjawab pelaksana catatan-catatan akuntansi hendaknya dipisahkan dengan tanggungjawab pelaksanaan transaksi perusahaan dan tugas menjaga aktiva perusahaan.
- e. Pembuktian dan sarana pengaman. Pembuktian dan sarana pengaman harus digunakan untuk menjaga aktiva perusahaan dan untuk meyakinkan akan kebenaran data akuntansi.
- f. Peninjauan kembali secara independen. Untuk menentukan apakah prosedur pengendalian intern telah dilaksanakan secara efektif, struktur pengendalian secara periodik perlu ditinjau kembali dan dievaluasi oleh auditor internal.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk

menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi.

4. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggungjawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

5. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengendalian tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memantau aktivitas entitas. Aktivitas

pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi dengan pihak luar seperti keluhan *customer* dan komentar masalah bidang yang memerlukan perbaikan.

2.3.3 Tujuan Pengendalian Internal

Esensi dari organisasi yang dikenali dengan efektif terletak pada setiap manajemen. Jika manajemen puncak merasa bahwa pengendalian internal itu penting maka anggota dalam rangka organisasi akan merasa hal itu dan beraksi dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebijakan kebijakan dan proses yang telah ditetapkan. Di lain pihak, jika pengendalian internal tidak dijadikan kepentingan manajemen puncak dan hanya dijadikan *lip service* (omongan belaka) maka dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian internal tidak dapat dicapai dengan efektif.

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Ivancevich, Konopaske dan Matteson (2006) adalah:

- a. Menjaga kekayaan organisasi. Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga

- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang diteliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.
- c. Mendorong efisiensi. Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Untuk mencapai tujuan perusahaan manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar, hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul

kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

Mulyadi mengemukakan beberapa tujuan pengendalian internal diantaranya yaitu:

1. **Keandalan informasi keuangan**
Pengendalian internal ini membuat manajemen bertanggungjawab menyiapkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak intern dan ekstern perusahaan, Laporan yang disajikan harus dapat diandalkan.
2. **Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku**
Pengendalian internal ini dimaksudkan agar organisasi melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku
3. **Efektifitas dan efisiensi operasi**
Pengendalian internal dalam perusahaan merupakan alat untuk mengurangi kegiatan pemborosan dan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien dalam operasi perusahaan.¹²

Sedangkan menurut Mardi (2011:59), tujuan pengendalian internal yaitu:

1. Menjaga keamanan harta milik perusahaan
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi
3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
4. Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan

2.4 Ketaatan Aturan Akuntansi

2.4.1 Pengertian Ketaatan Aturan Akuntansi

Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ketaatan adalah suatu sikap patuh terhadap aturan atau perintah yang

¹² Mulyadi, **Op.Cit**, hal 180

berlaku, sedangkan aturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) atau tindakan yang telah ditetapkan dan harus dijalankan. **Wajib bagi suatu organisasi untuk memiliki dasar atau pedoman yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan dan melaksanakan semua kegiatan perusahaan dan salah satunya aturan mengenai kegiatan akuntansi.**¹³

Menurut Rahmawati dalam Amin Kalau menyatakan bahwa **aturan akuntansi dibuat sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan- aturan yang telah dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).**¹⁴ Ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban pada semua instansi baik instansi pemerintah maupun swasta untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi yang berlaku.

Sedangkan Kusumastuti dalam Wiranti menjelaskan bahwa **suatu organisasi atau perusahaan terdapat aturan yang menjadi dasar perilaku manajemen yang dibuat untuk mencegah terjadinya aktivitas menyimpang yang dapat merugikan**

¹³Muammar Rizky dan Fauziah Aida Fitri, **Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Pengakuan Hukum, dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi**, JIMEKA, Vol.3, No 1, 2021, hal. 88-96

¹⁴Ali Amin Kalau dan Stevanus Z Leksair, **Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**, Jurnal Ekonomi, Vol.14, No.2,2020

perusahaan. Salah satu aturan dalam suatu perusahaan atau organisasi adalah aturan akuntansi.¹⁵

Dengan demikian aturan akuntansi merupakan pedoman bagi manajemen untuk mengarahkan bagaimana melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar dengan mematuhi segala aturan yang berlaku sehingga menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan.

2.4.2 Tujuan Ketaatan Aturan Akuntansi

Dalam suatu instansi ketaatan aturan akuntansi memiliki tujuan sebagai berikut:

Sebagai prinsip dan metode yang dijadikan dasar untuk diterapkan dalam penyelenggaraan segala aktivitas akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbasis kepada standar akuntansi keuangan dan perundang-undangan

Sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas segala jenis transaksi dan peristiwa ekonomi khususnya pada bidang keuangan yang terjadi dan untuk pelaporan keuangan (BUPK UNY,2013)

2.4.3 Fungsi Ketaatan Aturan Akuntansi

Dalam mewujudkan transparansi dalam bidang keuangan di sebuah instansi, ketaatan aturan akuntansi yang baik akan menjadi faktor yang penting. Aturan akuntansi memuat kebijakan dan prosedur akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sebuah instansi.

¹⁵ Ridha Wiranti dan Sekar Mayangsari, **Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Kesesuaian Kompensasi, Perilaku Tidak Etis, Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**, Jurnal Akuntansi, Vol.3, No. 1. 2016 hal 23-38

PP RI Nomor 24/2005 dalam Thoyibatun mengemukakan bahwa:

Aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi adalah standar akuntansi keuangan. Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dengan aturan yang sudah ditentukan oleh BPK dan/atau SAP.¹⁶

2.4.4 Ketaatan Aturan Akuntansi Dalam Pembuatan Laporan Keuangan

PP RI Nomor 24/2005 tentang SAP dalam Thoyibatun (2012) menyebutkan bahwa persyaratan pengungkapan pada setiap entitas akuntansi di lingkungan pemerintah diharapkan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kinerja.

Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Laporan-laporan tersebut dibuat dalam bentuk dan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam SAP agar kinerja organisasi antar periode dapat dibandingkan.

2.5 Perilaku Tidak Etis

2.5.1 Pengertian Perilaku Tidak Etis

Perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang disebabkan oleh hal yang substansial yaitu sikap dan tanggung jawab moral instansi.

¹⁶Siti Thoyibatun, **Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi**, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.16, No.2, 2012, hal.245-260

Menurut Velasques dalam Adelin, secara umum etika memiliki dua makna, yaitu:

- a. Etika berasal dari Bahasa Yunani, *ethos* (tunggal) atau *ta etha* (jamak) yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun dalam suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.
- b. Etika dalam pengertian kedua dipahami sebagai filsafat atau ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam masyarakat.¹⁷

Collins dalam Rusliaman mengemukakan bahwa: **“Etika merupakan seperangkat prinsip yang digunakan seseorang untuk menentukan apakah suatu tindakan itu baik atau buruk”**.¹⁸ Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam instansi harus mempertimbangkan etika. Suatu instansi tidak mudah untuk menentukan benar atau salah untuk situasi dan kondisi tertentu, khususnya ketika kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak saling bertentangan. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Perilaku etis adalah perilaku yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma- norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik (Griffin dan Ebert, 2006:58) dalam Fadilah (2018) sedangkan perilaku tidak etis adalah perilaku

¹⁷ Vani Adelin. **Op.,Cit**, hal. 7

¹⁸ Rusliaman dkk, **Pengantar Bisnis**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, Edisi Kedua, Medan, 2016, hal.27

yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk.

Wilopo dalam Darmawan menjelaskan bahwa **“Perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk di mengerti, yang jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya”**.¹⁹ sedangkan Dijk (2000:297-305) dalam Thoyibatun (2009) menjelaskan bahwa perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Perilaku tidak etis sendiri dapat mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan, oleh karena itu perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral.

Berdasarkan defenisi- defenisi yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis merupakan perilaku menyimpang yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan manajemen yang dapat memberikan kesempatan karyawan untuk melakukan tindakan tidak etis yang dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri.

2.5.2 Indikator Perilaku Tidak Etis

Tang et al., dalam Adelin menjelaskan indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam instansi yaitu:

- 1. *Abuse position* : perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi. Manajemen seringkali memanfaatkan jabatan atau posisinya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku**

¹⁹ Eko Darmawan. *Op.,Cit.*, hal.10

serta melakukan hal yang tidak wajar, seperti melakukan kecurangan salah saji dalam laporan keuangan

2. ***Abuse power*** : perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan. Seorang pemimpin memiliki kekuasaan tertinggi yang paling berkuasa pada laporan keuangan dan keputusan-keputusan mengenai laporan tersebut didalam sebuah perusahaan atau instansi. Sehingga tidak jarang seorang pemimpin menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan tidak etis seperti melakukan pencurian aktiva dimana hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.
3. ***Abuse resource*** : perilaku yang menyalahgunakan sumberdaya organisasi. Pihak yang memiliki kewenangan dalam suatu instansi akan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh instansi tersebut untuk memuaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan instansi itu sendiri. Tindakan menyimpang dapat berupa kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun penyalahgunaan aktiva.
4. ***No action*** : perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Perilaku ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin tidak melakukan apa-apa ketika ia mengetahui karyawannya melakukan tindakan yang menyimpang atau karyawannya berbuat tindak ketidakwajaran.²⁰

2.5.3 Faktor Penyebab Perilaku Tidak Etis

Perilaku tidak etis umumnya disebabkan oleh adanya kesempatan serta karena tidak adanya konsekuensi terhadap perilaku tidak etis terutama dalam hal pengungkapan.

Arens dan Loebbecke dalam Hesti menyebutkan bahwa terdapat dua faktor utama yang mungkin menyebabkan seseorang melakukan perilaku tidak etis yaitu:

1. **Standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Perbedaan prinsip dan pendapat membuat seseorang berbeda dengan yang lainnya. Ketika sekelompok orang beranggapan melakukan kecurangan adalah hal yang tidak wajar, sekelompok lain beranggapan sebagai hal yang wajar dilakukan. Adanya standar etika yang berbeda membuat perilaku tidak etis merupakan hal sulit untuk dimengerti.**

²⁰ Vani Adelin, *Op.Cit.*, hal. 7

2. Seseorang sengaja berperilaku tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, memaksa seseorang berperilaku tidak etis. Tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang lebih, yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.²¹

2.6 Perbandingan Kajian Pustaka

Jurnal 1: Penelitian oleh Laurensia Br Tarigan (2016)

Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh moral individu, asimetri informasi, efektivitas pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Seseorang yang memiliki moral akan melakukan tindakan perbuatan yang positif karena memiliki kesadaran akan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Adanya tingkah laku atau moral yang jelek menjadikan seseorang atau aparat pemerintah dapat melakukan tindakan kecurangan. Asimetri informasi ditimbulkan oleh munculnya *agent* dan *principal*. Kedua kelompok (*agent* dan *principal*) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya. Adanya perbedaan informasi yang diterima oleh *agent* dan *principal* memberikan pengaruh untuk melakukan tindakan kecurangan. Pengendalian internal dalam suatu instansi dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian individu. Dan dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi,

²¹ Hesti Arlich Arifyani, **Pengaruh Pengendalian Intern, Kepatuhan dan Kompensasi Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis Karyawan**, Jurnal Nominal, Vol. 1, No. 1, 2012

pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya dengan segala aturan yang berlaku. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1: Moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, H2: Asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, H3: Efektifitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, H4: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Jurnal 2: Muammar Rizky dan Fauziah Aida Fitri (2017)

Penelitian ini menjelaskan mengenai kecurangan akuntansi, keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan penegakan hukum. Kecurangan akuntansi merupakan kecurangan yang timbul sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya (IAI, 2001). Keefektifan pengendalian internal diartikan sebagai wujud nyata bahwa tujuan pengendalian internal sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dengan pengendalian dan pengawasan, sehingga dengan adanya pengendalian dan pengawasan kecurangan tidak akan terjadi. Ketaatan aturan akuntansi dijelaskan sebagai pedoman yang wajib digunakan oleh manajemen dalam suatu organisasi dalam menentukan dan melaksanakan semua kegiatan organisasi. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam penyajian laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan yang ditetapkan oleh IAI. Standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah disebut sebagai SAP

(Standar Akuntansi Pemerintah). Tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi disebabkan oleh perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis yang biasa dilakukan dapat berupa penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, penipuan, dan penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1: Keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, H2: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, H3: Penegakan hukum berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, H4: Perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi

Jurnal 3: Vani Adelin dan Eka Fauzihardani (2013)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori *fraud triangle*. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan kecurangan disebabkan oleh tiga faktor yaitu (1) Faktor tekanan, merupakan adanya insentif, tekanan dan kebutuhan untuk melakukan kecurangan. (2) Faktor kesempatan atau peluang, merupakan situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan. Kesempatan ini dapat berupa bekerja tidak ada prosedur yang cukup, tidak mampu menilai kualitas kerja, kurang atau tidak adanya akses informasi dan gagal dalam mendisiplinkan atau memberikan sanksi pelaku kecurangan. (3) Faktor alasan atau pembenaran, merupakan adanya sikap, karakter atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. Dalam penelitian ini pengembangan hipotesisnya yaitu H1: Efektifitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, H2: Ketaatan

aturan akuntansi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, H3: Perilaku tidak etis berpengaruh signifikan positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Jurnal 4: Deni Ahriati, Prayitno Basuki Dan Erna Widiastuty (2015)

Penelitian ini membahas tentang pengendalian internal, asimetri informasi, perilaku tidak etis dan kesesuaian kompensasi. Hipotesis yang digunakan yaitu H1: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, H2: Asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, H3: Perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, H5: Kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Jurnal 5: Ali Amin Kalau dan Stevanus Z Leksair (2020)

Penelitian ini menjelaskan mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi, keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, perilaku tidak etis. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kecenderungan kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan yang dapat berupa salah saji atau penghilangan secara sengaja dan salah saji yang timbul dari perlakuan yang tidak semestinya. Keefektifan pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan keandalan penyajian laporan keuangan. Ketaatan aturan akuntansi dapat menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan organisasi. Dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa perilaku tidak etis dapat berupa: (1) *Abuse position*, yaitu perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi. (2) *Abuse power*, yaitu perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan. (3) *Abuse resource*, yaitu perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi. (4) *No action*, yaitu perilaku yang tidak berbuat apa-apa.

Jurnal 6: Fanny Yulia, Rita Anugerah, dan Nur Azlina (2021)

Tinjauan teori dalam penelitian ini membahas mengenai pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi, moralitas manajemen, dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Jurnal 7: Ridha Wiranti dan Sekar Mayangsari (2016)

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan yaitu teori atribusi. Teori ini mengacu bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, dan sikap ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Hipotesis penelitian ini yaitu H1: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, H2: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan

akuntansi, H3: Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, H4: Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

Jurnal 8: Siti Rodiah, Ika Ardani, Aftania Herlina (2019)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *fraud triangle* sebagai acuan dalam mengetahui penyebab terjadinya kecurangan akuntansi. Seseorang melakukan kecurangan ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan yang mereka miliki mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercaya memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercaya kepada mereka. Hipotesis dalam peneliti ini yaitu H1: Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, H2: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, H3: Moralitas manajemen berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Jurnal 9: Devy Ervina Indriastuti, Agusdin dan Animah (2016)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan dan teori penalaran moral. Teori keagenan digunakan untuk memecahkan dua problem yang terjadi dalam hubungan keagenan. Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen disebut dengan *agency problems*.

Teori penalaran moral merupakan ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis. Sedangkan teori atribusi menjelaskan mengapa perilaku kepemimpinan terjadi. Hipotesis penelitian ini adalah H1: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, H2: Pengendalian interal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, H3: Persepsi kesesuaian berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, H5: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Jurnal 10: Cindi Kurnia Rahma Dewi (2017)

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kecurangan dapat terjadi diakibatkan oleh empat faktor, yang disebut juga dengan teori GONE yaitu: *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan), *exposure* (pengungkapan). Hipotesis penelitian ini yaitu H1: Pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, H2: Kesesuaian kompensasi mempunyai pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, H3: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, H4: Perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka. Studi kepustakaan menggunakan buku-buku dan literature literature lainnya sebagai objek yang utama. Menurut Eden Sitompul et.al **“Penelitian kepustakaan merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan membaca buku-buku referensi atau hasil-hasil sebelumnya”**²². Penelitian kepustakaan merupakan penelitian kualitatif desainnya bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang dengan situasi lapangan. Metode ini berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian kualitatif menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal dan penelitian yang sudah ada. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa penelitian ini termasuk

²² Eden Sitompul,et.al, **Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi (Penulisan Karya Ilmiah)**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, hal.111

kedalam jenis studi literatur. Aspek-aspek yang diteliti mencakup defenisi, konsep, pandangan, pemikiran- pemikiran dan argumentasi yang terdapat dalam literatur.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Elvis Purba **“Data sekunder adalah data yang telah ada atau data yang telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga”**²³. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur atau dengan menggunakan studi pustaka dengan tujuan mengumpulkan data informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan yang serupa akan dihimpun data-data utama dan sekaligus dengan tambahannya. Dalam teknik pengumpulan data menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan dengan berbagai cara.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kepustakaan. yaitu penulis perlu memperhatikan buku-buku atau hasil penelitian sebagai bahan bacaan. Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa jurnal yang berhubungan

²³ Elvis F Purba, **Metode Penelitian**, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2012, hal.107

dengan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku tidak etis atas kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan.

3.4 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data yang mendukung terhadap penelitian dan dari laporan deskriptif yang berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran bagaimana kaitan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan perilaku etis atas kecenderungan kecurangan akuntansi. Studi literatur dilakukan dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dan mendukung tentang tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi.

3.5 Metode Penelitian Terdahulu

Jurnal 1: Penelitian oleh Laurensia Br Tarigan (2016)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek, dimana data-datanya diperoleh secara langsung dari responden itu sendiri. Populasi dalam penelitian ialah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdaftar di Provinsi Riau. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Responden dalam penelitian ini yaitu para pegawai yang melaksanakan fungsistaf akuntansi/tata usaha keuangan pada BUMD Provinsi Riau. Metode analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel terikat dengan variabel bebas yang digunakan oleh peneliti.

Jurnal 2: Penelitian oleh Muammar rizky, Fauziah Aida Fitri (2017)

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data-data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian dengan formulir kuesioner.. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan dengan membagikan kuesioner. Masing-masing kuesioner terdiri dari 1 (satu) variabel terikat dan 4 (empat) variabel bebas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian analisis regresi linier berganda yaitu untuk mengetahui bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas.

Jurnal 3: Vani Adelin dan Eka Fauzihardani (2013)

Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah perusahaan BUMN yang ada di kota Padang di peroleh dari direksi dan staf akuntansi, dengan menggunakan metode survey-kuesioner. dalam penelitian metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.

Jurnal 4: Penelitian oleh Deni Ahriati, Prayitno Basuki, Erna Widiastuty (2015)

Penelitian ini dilakukan di SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan populasi sebanyak 276 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini merupakan penelitian data primer yang menggunakan kuesioner dengan responden yang terdiri dari Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian Keuangan dan Staf Keuangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Jurnal 5: Penelitian oleh Ali Amin Kalau dan Stevanus Z Leksair (2020)

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* dengan metode kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Usaha Milik Negara di Kota Ambon. Pengumpulan data menggunakan teknik angket (kuesioner) yang dibagikan kepada responden dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda.

Jurnal 6: Fanny Yulia, Rita Anugerah dan Nur Azlina (2021)

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di 33 organisasi perangkat daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan responden terdiri dari kepala bagian keuangan, kepala sub bagian keuangan dan bendahara pengeluaran yang berjumlah 68 orang. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *sampling jenuh*.

Jurnal 7: Penelitian oleh Ridha Wiranti dan Sekar Mayangsari (2016)

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN di kota Jakarta. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *random sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Jurnal 8: Siti Rodiah, Ika Ardianni dan Aftania Herlina (2019)

Dalam penelitian ini menggunakan data primer, dimana data- data yang akan diolah diperoleh langsung dari sumber asli (objek penelitian). Sumber data primer didapat dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi pada penelitian ini adalah semua pegawai yang ada di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Sampel penelitian ini sebanyak 109 responden. Metode sampling dalam penelitian ini adalah *random sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan kuisisioner. Metode pengolahan yang dilakukana adalah regresi linier berganda

Jurnal 9: Devi Ervina Indriastuti, Agusdin dan Animah (2016)

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Dalam penelitian ini sampel penelitian sebanyak 90 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan secara

proporsional *stratified random sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus regresi berganda.

Jurnal 10: Penelitian oleh Chindy Kurnia Rahma Dewi (2017)

Jenis penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dimana peneliti mengolah data-data berupa angka. Populasi dalam penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah 35 SKPD. Sampel dalam penelitian adalah Kepala Bagian Keuangan dan Staf Bagian Keuangan pada SKPD di Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 70 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah melakukan survey dengan menggunakan kuesioner. Peneliti mengantarkan langsung ke alamat responden. Demikian pula dengan pengambilan kuesioner, peneliti juga mengambil sendiri kuesioner yang sudah dibagikan. Metode analisis data yang digunakan peneliti ialah analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat.